

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MASA KELANGKAAN MINYAK GORENG AKIBAT PENIMBUNAN OLEH PELAKU USAHA

Friska Princeslie

03051190026

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen pada masa kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuan penelitian kedua untuk mengetahui penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian dengan menggunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan dukungan data-data lapangan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan permasalahan penelitian. Cara perolehan data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data studi kepustakaan. Didukung dengan data primer sebagai salah satunya bisa diperoleh melalui Teknik Wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data primer dan data sekunder yang tersusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen pada masa kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan oleh pelaku usaha ditinjau dari UUPK bahwa konsumen berhak untuk membeli minyak goreng sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; bentuk perlindungan yang diberikan berdasarkan UUPK yaitu Pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen dan Pasal 45 mengenai penyelesaian sengketa konsumen dengan cara penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng ditinjau dari UU Persaingan Usaha dapat digunakan jika penimbunan merupakan bagian dari penetapan harga, penguasaan pasar, atau pemasaran barang yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, Penimbunan, Penerapan sanksi, pelaku usaha , Harga Eceran Tertinggi.

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS DURING COOKING OIL SCARCITY DUE TO STILLING BY BUSINESS PLAYERS

Friska Princeslie

03051190026

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the protection of consumers during the scarcity of cooking oil due to hoarding by business actors in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The second research objective is to determine the application of sanctions to business actors who carry out cooking oil hoarding in terms of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Business Competition Law).

The research method used in this study is an empirical normative research method. Empirical normative research is research using library data related to laws and regulations and associated with the support of field data obtained from interviews with informants related to research problems. The data acquisition method used is secondary data obtained through library study data collection. Supported by primary data as one of which can be obtained through interview techniques. In this study the authors used qualitative analysis techniques, namely collecting, analyzing and interpreting primary data and secondary data which were arranged systematically.

The results of the study show that consumer protection during a period of scarcity of cooking oil due to hoarding is seen from UUPK that consumers have the right to buy cooking oil according to the Highest Retail Price (HET) that has been determined in laws and regulations; the form of protection provided under the UUPK is Article 4 which regulates consumer rights and Article 45 regarding consumer dispute resolution by way of settlement out of court through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or through courts within the general court environment. Judging from the Business Competition Law, the application of sanctions to business actors who hoard cooking oil can be used if hoarding is part of price fixing, market control, or marketing of goods which results in monopolistic practices or unfair business competition.

Keywords: *Consumer protection, Hoarding, Application of sanctions, business actors, Highest Retail Prices.*